

BAB II

TITIK AWAL PEMBERDAYAAN GENDER

2.1 Permasalahan Tentang Isu Kesenjangan Gender

Bab dua pada penelitian ini menjelaskan mengenai awal mula penyebab dari diskriminasi gender yang mana sejarah budaya patriarki sekaligus masuknya nilai-nilai modernisasi telah membuat isu kesenjangan gender menjadi isu perhatian global. Perhatian global tersebut disebabkan oleh gesekan yang kuat antara budaya patriarki dengan nilai-nilai modernisasi, suatu negara yang pada awalnya sangat erat dengan budaya patriarki, kini negara tersebut harus patuh terhadap arus modernisasi yang serentak menyuarakan kesetaraan gender. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan perbedaan-perbedaan yang signifikan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, terutama pada pembangunan. Kaum perempuan tidak selalu berpartisipasi dalam merencanakan, memutuskan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi proses pembangunan.¹ Isu kesenjangan gender menjadi salah satu titik kelemahan Jepang disamping citranya yang telah diakui sebagai negara maju. Meskipun begitu, Pemerintah dan masyarakat akan terus melakukan upaya-upaya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang diakibatkan oleh budaya patriarki, khususnya kesenjangan gender.

¹ Koalisi Perempuan Indonesia, *KESENJANGAN GENDER*, from : <http://www.koalisiperempuan.or.id/2011/05/04/kesenjangan-gender/>. (10/5/2020 , 15:31 WIB)

2.1.1 Sejarah Budaya Patriarki, sebagai sebab awal ketidaksetaraan gender.

Patriarki merupakan sebuah sistem yang menempatkan laki-laki dewasa pada posisi sentral atau yang terpenting, sementara yang lainnya seperti istri dan anak diposisikan sesuai kepentingan *the patriarch* (laki-laki dewasa tersebut). Dalam sistem patriarki, perempuan diposisikan sebagai istri yang bertugas mendampingi, melengkapi, menghibur, dan melayani suami (*The Patriarch*), sementara anak diposisikan sebagai generasi penerus dan penghibur ayahnya.² Patriarki adalah perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Berlandaskan dengan konsep tersebut, masyarakat Jepang menjadikannya sebagai aturan sosial dalam menjalankan segala hal dalam kehidupan sosial masyarakat Jepang.³ Dalam hal ini, budaya patriarki menggambarkan bahwa terdapat perbedaan tingkatan antara kaum laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memiliki posisi tertinggi dalam menjalankan kehidupan, baik dalam sektor ranah kekeluargaan, masyarakat dan negara.

Pada tahap perkembangan sejarahnya, budaya patriarki merupakan gambaran tentang perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan yang di pengaruhi oleh masuknya 3 ajaran keyakinan diantaranya Agama Budha,

² Nina Nurmila. (2015). *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya*. KARSa: Journal of Social and Islamic Culture, 23(1), hal. 1. From : <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/606> , (10/11/2018, 18:53 WIB)

³ M.C.S Simorangkir. (2017). *Feminisme pada Masa Meiji di Jepang*. From : <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7588> , (10/11/2018, 19:23 WIB)

kepercayaan Shinto dan ajaran konfusianisme dari China pada Abad ke 7 dan 8.⁴ Sebenarnya terdapat perbedaan pandangan terhadap kedudukan gender pada era sebelumnya berdasarkan sejarah Jepang kuno dimana antara laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara dan sama dalam hal kepemimpinan. Fakta menunjukkan bahwa Jepang pernah diperintah oleh seorang kaisar perempuan yakni hingga awal periode Muromachi. Selain itu, dalam sejarah Jepang kuno dikenal adanya kepercayaan atas pemujaan *Amaterasu* yang merupakan dewa matahari yang berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut menimbulkan stigma bahwa kaum perempuan diyakini memiliki kekuatan supranatural khusus dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Masyarakat Jepang menganut keyakinan ini hingga awal periode tersebut yang dikenal dengan masyarakat matriarkal.⁵ Pada era Meiji, posisi kedudukan perempuan mengalami perubahan dimana hal tersebut terlihat dari posisi keduanya dalam keluarga. Anak laki-laki tertua dipercaya untuk meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya, dalam artian bahwa selain daripada anak laki-laki tertua, termasuk istri tidak memiliki kewenangan secara hukum. Selain itu, seorang Istri juga tidak memiliki wewenang dalam satupun praktek suami pada kehidupan berumah tangga, sehingga kemungkinan besar seorang suami dapat bertindak bebas mencari kesenangan dengan perempuan lain tanpa persetujuan istri sah. Hal ini kemudian menjadi awal titik awal terkait rendahnya posisi kaum perempuan dalam tatanan sosial. Diskriminasi hukum juga terjadi pada tahun 1908 yang mana

⁴ Indun Roosiani. (2016). *KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT JEPANG*. WAHANA| JURNAL BAHASA, SASTRA, KOMUNIKASI, DAN BUDAYA, 1(13). Hal. 70. From : <https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/view/672> , (10/11/2018, 19:00 WIB)

⁵ *Ibid.*, hal. 70-71.

perzinahan merupakan sebuah tindakan kejahatan dan akan dikenakan sanksi hokum pidana. Namun dalam penerapannya, seorang istri yang selingkuh akan dikenai sanksi bersamaan dengan pasangan selingkuhnya sedangkan hal itu tidak berlaku bagi kaum laki-laki yang berbuat sedemikian rupa, dalam artian suami bebas melakukan perselingkuhan meskipun selingkuhnya telah berstatus sebagai istri orang lain.⁶

Mayoritas masyarakat di Jepang, penduduk pria lebih banyak daripada perempuan. Dalam keluarga, perempuan bertanggung jawab semuanya, mulai dari mengurus suami dan rumah tangga. Tugas suami hanyalah bekerja mencari nafkah. Manga dan film-film Jepang, baik setting lama maupun baru pun secara tidak langsung menunjukkan hal tersebut. Jika satu keluarga akan bepergian, maka sang istrilah yang menyiapkan semuanya. Bahkan, sampai menyiapkan dan memasukan semua barang ke dalam mobil pun dilakukan oleh istri. Suami tinggal masuk mobil dan menyetir.⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa semakinnya kuat nilai-nilai dari budaya patriarki semakin juga merendahkan posisi kedudukan perempuan, nilai-nilai dari budaya ini bertahan hingga sebelum masuknya isu feminisme di Jepang, dimana kemunculan gerakan gerakan feminisme yang berbeda pada era Meiji sebagai simbol perlawanan terhadap kesenjangan gender, yakni sebelum tahun 1980an.

⁶ *Ibid.*, hal 74.

⁷ Ishomudin, 2016, *Japanese Culture*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, hal. 80.

2.1.2 Modernisasi Jepang

Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, dimana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸ Arus Modernisasi Jepang sebenarnya diawali sejak Restorasi Meiji tahun 1868 dimana Jepang mulai membuka diri pada dunia dan kehidupan luar.⁹ Namun pada pembahasan ini, penulis akan lebih fokus pada modernisasi setelah Perang Dunia 2 yang menghasilkan perubahan-perubahan sosial hingga menimbulkan fenomena-fenomena seperti, *Isu kesetaraan gender dan isu demografi*.

a) Isu Gender

Fenomena kesetaraan gender merupakan sebuah isu yang lahir dari kesenjangan gender. Kesenjangan Gender disebabkan oleh nilai-nilai kebudayaan patriarki yang meletakkan posisi kedudukan laki-laki lebih secara signifikan dibanding dengan posisi kedudukan perempuan. Kaum pria dianggap lebih superior daripada kaum perempuan, anggapan tersebut telah muncul sejak keduanya menginjak masa remaja. Hal semacam ini sudah ada berdasarkan pengalaman historis beserta perkembangannya. Fenomena kesetaraan gender semakin berkembang dengan seiring kemunculan gerakan feminisme. Masyarakat Jepang tradisional memandang bahwa kedudukan perempuan sangat

⁸ E. Rosana, (2011). *Modernisasi dan perubahan sosial*. Jurnal TAPIs, 7(1), hal. 33. From : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1529> , (14/11/2018, 16:00 WIB)

⁹ B. Wibawarta, (2006). *Bushido dalam Masyarakat Jepang Modern*. Wacana, 8(1), hal. 58-59. From : <http://wacana.ui.ac.id/index.php/wjhi/article/download/246/235> , (14/11/2018, 16:24 WIB).

mutlak berada dibawah kaum laki-laki. Hal ini disebabkan oleh pemerintahan pada zaman feodal yang mana mayoritas masyarakat pada zaman itu memandang bahwa posisi kaum laki-laki lebih tinggi sehingga banyak sekali ditemukan kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif. Kaum perempuan secara perlahan dapat merasakan kebebasan seiring dengan arus modernisasi Jepang pada abad ke-19 yang telah mengubah pandangan masyarakat tentang konsep perempuan tradisional. Modernisasi telah memberikan ruang yang lebih luas pada aktivitas perempuan. Hal tersebut tentunya mendapatkan respon positif dari kaum perempuan yang mana mulai terlihat eksistensinya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, HAM, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Peningkatan terhadap eksistensi kaum pergerakan kaum perempuan modern terjadi seiring dengan mulai dikenalnya konsep feminisme. Sehingga berdampak bagi kaum perempuan dengan mulai menyadari dan menuntut hak-hak dalam aspek kehidupan yang setara dengan kaum laki-laki. Arus modernisasi dan feminisme seolah-olah menjanjikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk memiliki karir yang cemerlang, namun disisi lain fenomena-fenomena tersebut mengakibatkan kaum perempuan berani untuk menunda pernikahan bahkan menolak pernikahan.¹⁰ Maka dari itu, sikap dari para generasi muda di Jepang yang lebih memilih untuk menunda pernikahan menyebabkan timbulnya dampak terhadap penurunan angka kelahiran di Jepang, baik dari sikap kaum pria yang dilatarbelakangi oleh pekerjaan yang padat, maupun sikap kaum perempuan yang dipengaruhi oleh prinsip yang ada pada gerakan feminisme, seperti *Fuji No Tomo (Teman*

¹⁰ S.D. Adriani, (2014), *Pengaruh Paham Feminisme Terhadap Penurunan Populasi Penduduk di Jepang [少子化]*. Humaniora, 5(1), hal. 355. From : <http://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3033> , (14/11/2018, 19:00 WIB).

Perempuan 1908), *Fusen Kakutoku Doumei* (*Liga hak pilih perempuan*), *Seitosha* (*masyarakat stoking Biru 1911*), *Dai Nippon Fujinkai* (*Asosiasi Perempuan Jepang, 1942*)¹¹ dan lain sebagainya.

b) *Isu Demografi*

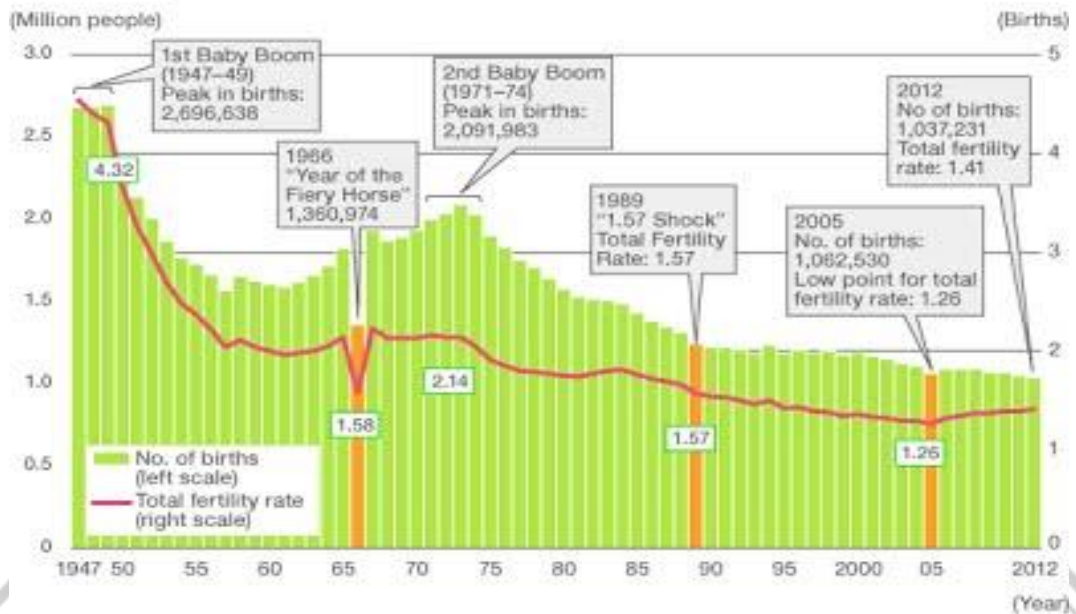
Fenomena perubahan jumlah penduduk di Jepang dipengaruhi oleh kebijakan kebijakan pemerintah sejak pasca Perang Dunia 2. Jepang sempat mengalami peningkatan angka kelahiran pada waktu dekat pasca Perang Dunia 2 yakni pada tahun 1947. Oleh karena pada saat itu pemerintah Jepang hanya fokus dalam tranformasi ekonomi dan kemudian mengambil kebijakan yang mana kebijakan tersebut melonggarkan kesempatan bagi perempuan yang ingin melakukan pengguguran kandungan pada tahun 1952,¹² hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk demi kelancaran menuju tahap modernisasi ekonomi. Setelah itu, Jepang terus mengalami penurunan angka kelahiran pada tahun 1956 hingga 1964 dan selanjutnya mengalami penurunan kembali pada tahun 1975-1980.¹³

¹¹ E.H. Wulandari, (2003). *Gerakan Feminisme Jepang Studi tentang Gerakan Protes Ketidakadilan terhadap Perempuan pada Awal Zaman Modern*. Wacana, 5(1), hal. 19-29. From : <http://wacana.ui.ac.id/index.php/wjhi/article/view/317> , (15/11/2018, 20:30 WIB)

¹² Tadashi Fukutake, (1988), *MASYARAKAT JEPANG DEWASA INI*, Jakarta: PT. Gramedia, hal: 16-17.

¹³ *Ibid.*, hal. 18-19.

Graph 1 Number of Births and Total Fertility Rate



Source: Ministry of Health, Labor, and Welfare's statistics on population change.

nippon.com

Grafik 1, Shock Birth In Japan, From : (<https://sites.google.com/site/birthrateandagingpopulation/dome>)

Dalam mempejelas hal mengenai perubahan demografi, grafik di atas menunjukkan bahwa Jepang mengalami penurunan angka kelahiran sejak era pasca perang yakni pada tahun 1950, dan kemudian adanya peningkatan pada tahun 1970-1974 dan dapat dikatakan sebagai puncak kelahiran tertinggi pada era liberalisasi ekonomi Jepang. Namun pada tahun 1990, Jepang dikejutkan dengan penurunan angka kelahiran terendah sejak 100 tahun, hal ini disebabkan oleh peningkatan minat kerja oleh kaum perempuan, lalu kemudian juga didukung oleh munculnya fenomena “*bankonka*” (*delayed marriage*) dan “*hikonka*” (*nonmarriage*)¹⁴ yang menunjukkan bahwa kaum perempuan di Jepang pada saat itu lebih menginginkan karir dalam menjalani kehidupan. Selain itu, dalam artian penurunan angka kelahiran tersebut juga tidak bisa lepas dari arus modernisasi dalam konteks peran kaum perempuan, dimana modernisasi di Jepang ini memberikan ruang

¹⁴ Y. Widarahesty & R. Ayu , *Op. Cit.*, hal. 188.

kesempatan terhadap adanya pengakuan yang memberikan tempat kepada perempuan Jepang untuk ikut berperan sebagai bagian dari modernisasi tersebut. Alasan rasionalitas yang dikedepankan oleh modernisasi terhadap perubahan demografi ialah sebagai sikap kontradiksi atas nilai-nilai kebudayaan tradisional Jepang seperti budaya patriarki yang sudah mengakar lalu kemudian dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap kelompok perempuan Jepang.

2.2 Kritik PBB terhadap Kesenjangan Gender di Jepang

Isu gender merupakan isu kontemporer yang menjadi topik menarik untuk diteliti. Karakteristiknya yang sebagian dinilai sebagai isu yang mengandung 2 makna bertentangan, antara harmonisasi dan konflikktual menjadikan isu terkait diperdebatkan oleh berbagai kalangan.¹⁵ Keberadaan isu gender sangat diakui oleh masyarakat Internasional, mengingat bahwa isu gender terlibat dengan isu-isu ilmu politik, seperti politik sistem dan pembuatan kebijakan, perwakilan, partisipasi, kewarganegaraan, identitas, kesetaraan, dan gerakan perempuan, studi maskulinitas serta hubungan internasional.¹⁶ Gender dan Politik adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan pada saat ini, mengingat bahwasanya gender menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan sosial dan politik bagi suatu bangsa dan negara. Hal tersebut menjadi sinergi yang kuat antara isu gender dan isu politik menjadi tanggung jawab bersama. Kesetaraan memang tidak dapat ditempuh dengan mudah, namun dapat diberlakukan secara perlahan dengan memperdayakan dan

¹⁵ Mieke Verloo, (2007). *Multiple meanings of gender equality: A critical frame analysis of gender policies in Europe*. Central European University Press. Hal. 22.

¹⁶ Anna van der Vleuten, Anouka van Eerdewijk, Conny Roggeband, (2014). *Gender equality norms in regional governance. Transnational dynamics in Europe, South America and Southern Africa*. Palgrave Macmillan. *Gender in Politics series*.

melibatkan kaum perempuan ke dalam proses pembangunan nasional tanpa menentang norma kaum patriarki yang sudah mendasarinya. Seringkali beberapa negara tidak memperhatikan keterlibatan kaum perempuan pada proses pembangunan nasional telah menimbulkan pertentangan dari berbagai kalangan organisasi maupun gerakan-gerakan yang memperjuangkan isu-isu gender.

Jepang merupakan sebuah negara yang masih sangat erat memegang budaya patriarkinya, hal tersebut terbukti dengan data-data yang menunjukkan tingginya angka kesenjangan gender di negara ini. Menurut laporan *Global Gender Gap* tahun 2008, Jepang berada di urutan 98 dari 130 negara, angka tersebut jelas bahwa nilai-nilai kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud.¹⁷ Dalam hal ini, Jepang menempati posisi ke 98 secara keseluruhan, dengan lebih rincinya yakni, Jepang menempati urutan 102 dalam *Economic Participation and Opportunity*, urutan 82 dalam *Educational Attainment*, dan urutan 107 dalam *Political Empowerment*.¹⁸ Pada tahun 2008, kaum perempuan di Jepang hanya 9,4 persen yang menempati kursi parlemen, 10,8 di perusahaan-perusahaan swasta Jepang, dan yang lebih memprihatinkan ialah pada lingkup Sains dan Teknologi, terutama di lingkup Universitas baik lingkup dosen ataupun mahasiswa. Kaum perempuan Jepang mengalami kesulitan untuk berkarir di

¹⁷ Ricardo H., Laura D.T., Saadi Z., (2008). *The Global Gender Gap Report*. World Economic Forum. Hal. 11. From : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2008.pdf , (14/5/2020, 14:50 WIB)

¹⁸ *Ibid.*

bidang sains dan teknologi, ini merupakan presentase terendah dari pada bidang-bidang lainnya.¹⁹

Country	2008 rank	2008 score	2008 rank among 2007 countries	2007 rank	2007 score	2006 rank	2006 score	Change in score (2008–2007)	Change in score (2007–2006)	Change in score (2008–2006)
Romania	70	0.6763	69	47	0.6859	46	0.6797	-0.0097	0.0062	-0.0035
Nicaragua	71	0.6747	70	90	0.6458	62	0.6566	0.0289	-0.0108	0.0181
Dominican Republic	72	0.6744	71	65	0.6705	59	0.6639	0.0039	0.0065	0.0105
Brazil	73	0.6737	72	74	0.6637	67	0.6543	0.0100	0.0094	0.0194
Madagascar	74	0.6736	73	89	0.6461	84	0.6385	0.0274	0.0076	0.0350
Greece	75	0.6727	74	72	0.6648	69	0.6540	0.0079	0.0107	0.0186
Cyprus	76	0.6694	75	82	0.6522	83	0.6430	0.0172	0.0092	0.0264
Ghana	77	0.6679	76	63	0.6725	58	0.6653	-0.0046	0.0072	0.0026
Armenia	78	0.6677	77	71	0.6651	n/a	n/a	0.0027	n/a	n/a
Suriname	79	0.6674	78	56	0.6794	n/a	n/a	-0.0120	n/a	n/a
Bolivia	80	0.6667	79	80	0.6574	87	0.6335	0.0093	0.0239	0.0332
Malawi	81	0.6664	80	87	0.6480	81	0.6437	0.0183	0.0044	0.0227
Georgia	82	0.6654	81	67	0.6665	54	0.6700	-0.0011	-0.0035	-0.0046
Malta	83	0.6634	82	76	0.6615	71	0.6518	0.0019	0.0097	0.0116
Singapore	84	0.6625	83	77	0.6609	65	0.6550	0.0017	0.0059	0.0076
Gambia, The	85	0.6622	84	95	0.6421	79	0.6448	0.0200	-0.0027	0.0173
Belize	86	0.6610	85	94	0.6426	n/a	n/a	0.0183	n/a	n/a
Albania	87	0.6591	86	66	0.6685	61	0.6607	-0.0094	0.0078	-0.0016
Kenya	88	0.6547	87	83	0.6508	73	0.6486	0.0039	0.0023	0.0062
Tajikistan	89	0.6541	88	79	0.6578	n/a	n/a	-0.0038	n/a	n/a
Bangladesh	90	0.6531	89	100	0.6314	91	0.6270	0.0216	0.0044	0.0261
Maldives	91	0.6501	90	99	0.6350	n/a	n/a	0.0151	n/a	n/a
Zimbabwe	92	0.6485	91	88	0.6464	76	0.6461	0.0021	0.0004	0.0025
Indonesia	93	0.6473	92	81	0.6550	68	0.6541	-0.0077	0.0009	-0.0068
Cambodia	94	0.6469	93	98	0.6353	89	0.6291	0.0116	0.0062	0.0178
Mauritius	95	0.6466	94	85	0.6487	88	0.6328	-0.0022	0.0160	0.0138
Malaysia	96	0.6442	95	92	0.6444	72	0.6509	-0.0002	-0.0065	-0.0067
Mexico	97	0.6441	96	93	0.6441	75	0.6462	0.0000	-0.0021	-0.0021
Japan	98	0.6434	97	91	0.6455	80	0.6447	-0.0021	0.0008	-0.0013
Brunei Darussalam*	99	0.6392	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Paraguay	100	0.6379	98	69	0.6659	64	0.6556	-0.0279	0.0103	-0.0177
Kuwait	101	0.6358	99	96	0.6409	86	0.6341	-0.0051	0.0068	0.0017
Nigeria	102	0.6339	100	107	0.6122	94	0.6104	0.0217	0.0018	0.0235
Tunisia	103	0.6295	101	102	0.6283	90	0.6288	0.0012	-0.0006	0.0006
Jordan	104	0.6275	102	104	0.6203	93	0.6109	0.0072	0.0094	0.0166
United Arab Emirates	105	0.6220	103	105	0.6184	101	0.5919	0.0036	0.0265	0.0300
Zambia	106	0.6205	104	101	0.6288	85	0.6360	-0.0084	-0.0071	-0.0155
Syria	107	0.6181	105	103	0.6216	n/a	n/a	-0.0035	n/a	n/a
Korea, Rep.	108	0.6154	106	97	0.6409	92	0.6157	-0.0254	0.0251	-0.0003
Mali	109	0.6117	107	112	0.6019	99	0.5996	0.0098	0.0022	0.0121
Mauritania	110	0.6117	108	111	0.6022	106	0.5835	0.0095	0.0187	0.0282
Algeria	111	0.6111	109	108	0.6068	97	0.6018	0.0042	0.0050	0.0092
Guatemala	112	0.6072	110	106	0.6144	95	0.6067	-0.0072	0.0077	0.0005
India	113	0.6060	111	114	0.5936	98	0.6011	0.0124	-0.0075	0.0049
Angola	114	0.6032	112	110	0.6034	96	0.6039	-0.0002	-0.0005	-0.0007
Burkina Faso	115	0.6029	113	117	0.5912	104	0.5854	0.0117	0.0059	0.0175
Iran	116	0.6021	114	118	0.5903	108	0.5803	0.0117	0.0101	0.0218
Cameroon	117	0.6017	115	116	0.5919	103	0.5865	0.0098	0.0053	0.0151
Oman	118	0.5960	116	119	0.5903	n/a	n/a	0.0057	n/a	n/a
Qatar	119	0.5948	117	109	0.6041	n/a	n/a	-0.0093	n/a	n/a
Nepal	120	0.5942	118	125	0.5575	111	0.5478	0.0367	0.0097	0.0464
Bahrain	121	0.5927	119	115	0.5931	102	0.5894	-0.0003	0.0037	0.0034
Ethiopia	122	0.5867	120	113	0.5991	100	0.5946	-0.0124	0.0045	-0.0079
Turkey	123	0.5853	121	121	0.5768	105	0.5850	0.0085	-0.0082	0.0003
Egypt	124	0.5832	122	120	0.5809	109	0.5786	0.0023	0.0023	0.0047
Morocco	125	0.5757	123	122	0.5676	107	0.5827	0.0082	-0.0151	-0.0069
Benin	126	0.5582	124	123	0.5656	110	0.5780	-0.0075	-0.0123	-0.0198
Pakistan	127	0.5549	125	126	0.5509	112	0.5434	0.0040	0.0075	0.0115
Saudi Arabia	128	0.5537	126	124	0.5647	114	0.5242	-0.0110	0.0405	0.0295
Chad	129	0.5290	127	127	0.5381	113	0.5247	-0.0091	0.0134	0.0043
Yemen	130	0.4664	128	128	0.4510	115	0.4595	0.0154	-0.0085	0.0069

Table 1 The Global Gender Gap 2008, from : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2008.pdf

¹⁹ Tomoko Otake, 2008. *Japan's gender inequality puts it to shame in world rankings*. The Japan Times. From : <https://www.japantimes.co.jp/life/2008/02/24/lifestyle/japans-gender-inequality-puts-it-to-shame-in-world-rankings/#.Xr0AifIzbIU>. (14/5/2020, 15:32 WIB)

Lebih lanjut, data-data diatas menunjukan bahwa Jepang masih mendapati kesenjangan gender yang signifikan di dalam negerinya. Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi penyebab datangnya kritikan-kritikan secara internasional yang mengarah pada kesenjangan gender di Jepang, beberapa diantaranya ialah sebagai berikut:

1. CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

CEDAW mengkritik melalui dokumen sesi ke 44 working group yang mengusung tema *Gender Discrimination and Women Rights* pada tahun 2009. CEDAW merupakan suatu konvensi komite yang dibentuk melalui perjanjian Internasional oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) pada tahun 1979.²⁰ Hal tersebut merupakan fasilitas dari PBB untuk kaum perempuan dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran-pelanggaran hak-hak perempuan. PBB menegaskan bahwa sebuah negara harus serius dalam menangani hal-hal pelanggaran dan kekerasan terhadap perempuan, dan negara tidak seharusnya terlalu mentaati adat, tradisi ataupun pertimbangan keagamaan serta menuntut negara mengembangkan sanksi sipil dan terus berupaya memperbaiki kesalahan yang terjadi pada kaum perempuan.²¹ Berkaitan dengan hal tersebut, CEDAW melayangkan sebuah kritik kepada Jepang terkait kesenjangan gender yang masih rentan terjadi, kritikan tersebut berbunyi:

“...that no temporary special measures are in place to accelerate de facto equality between men and women or to improve the enjoyment by women of their

²⁰ Anna van der Vleuten, Anouka van Eerdewijk, Conny Roggeband, *Op., Cit.*

²¹ *Ibid.* Hal. 6.

rights in the State party, in particular with regard to women in the workplace and the participation of women in political and public life.”²²

Kritikan tersebut tertuju pada pemerintah Jepang bahwa tidak ada langkah-langkah konkrit untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender serta meningkatkan pencapaian hak-hak bagi kaum perempuan, khususnya hak-hak kesetaraan yang berkaitan dengan kaum perempuan di tempat kerja, kehidupan publik dan politik. Komite meminta pemerintah agar menjadikan realisasi kesetaraan gender sebagai focus utama dalam rangka mengatasi diskriminasi dibidang pekerjaan dan upah kerja. Hal-hal mengenai praktik pemecatan kerja secara ilegal terhadap kaum perempuan yang sedang mengalami kehamilan dan persalinan agar segera ditindak lanjuti berupa sanksi hukum terhadap lembaga-lembaga perusahaan yang terlibat dalam praktek tersebut. Kemudian pemerintah harus mempromosikan kebijakan sebagai strategi yang mengarah pada anak-anak dan keluarga hingga peningkatan cuti pekerjaan bagi kaum laki-laki guna mengurangi beban berat kaum perempuan dalam urusan rumah tangga ataupun keluarga.²³ Mengenai hal tersebut, *CEDAW* mendorong pemerintah dalam pembuatan kebijakan sebagai upaya menyeimbangkan kaum perempuan dan laki-laki dalam hal tanggung jawab keluarga dan pekerjaan dengan menggunakan

²² UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), *Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, *Op. Cit*, hal. 5.

²³ *Ibid.*, hal. 10.

mekanisme peningkatan fasilitas dan kesadaran pendidikan tentang pembagian tugas dalam pengasuhan anak.²⁴

CEDAW mendesak Pemerintah untuk mengadopsi dan menerapkan *Charter for Work-Life Balance* dan *Action Policy for Promoting Work-Life Balance* serta menyusun langkah-langkah strategi untuk meningkatkan tunjangan upah kerja dan perawatan anak, mendukung gaya baru kerja yang seimbang seperti promosi pemotongan jam kerja dan penggunaan cuti pengasuhan anak. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan angka pengasuhan anak oleh kaum laki-laki yang mana sebelumnya hanya berjumlah 1,56 % pada tahun 2007.²⁵ Secara umum, kritikan diatas merupakan bentuk desakan atau tuntutan PBB yang diwakili oleh CEDAW untuk pemerintah Jepang terkait kesetaraan gender dan masih minimnya langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi tren isu terkait. CEDAW merekomendasikan agar Pemerintah Jepang dan jajaran kementerian negara dalam bidang kesetaraan gender meningkatkan koordinasi untuk mendesain *The Third Basic Plan for Gender Equality* sebagai sistem teratur dalam menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.²⁶

2. IMF (International Monetary Fund)

Working paper yang berjudul *Can Woman Save Japan* merupakan karya dari IMF yang merepresentasikan keprihatinan terhadap kaum perempuan di Jepang. Hal ini juga merupakan kritik terhadap Jepang. Di dalamnya tertulis

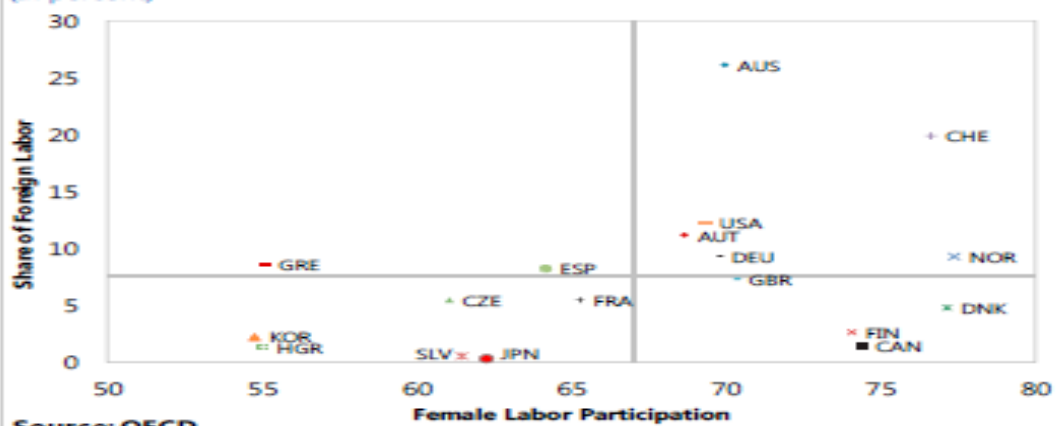
²⁴ UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), *Op. Cit.* hal. 17.

²⁵ Lihat, *Ibid.*

²⁶ UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), *Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, *Op. Cit.* hal. 5.

bahwa kesenjangan gender di Jepang masih sangat masif terjadi. IMF juga menggunakan basis data lintas-negara sehingga dapat menemukan fakta bahwa banyak kaum perempuan yang belum mendapatkan pendidikan tinggi. IMF mendesak Jepang agar terus berupaya membuat kebijakan dalam mengurangi kesenjangan gender terutama dalam hal pendidikan dan karir.²⁷ IMF menegaskan bahwa Jepang berada di peringkat bawah dalam hal imigrasi dan partisipasi tenaga kerja perempuan pada lingkup OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*).

Figure 3. Immigration and Female Labor Participation
(In percent)



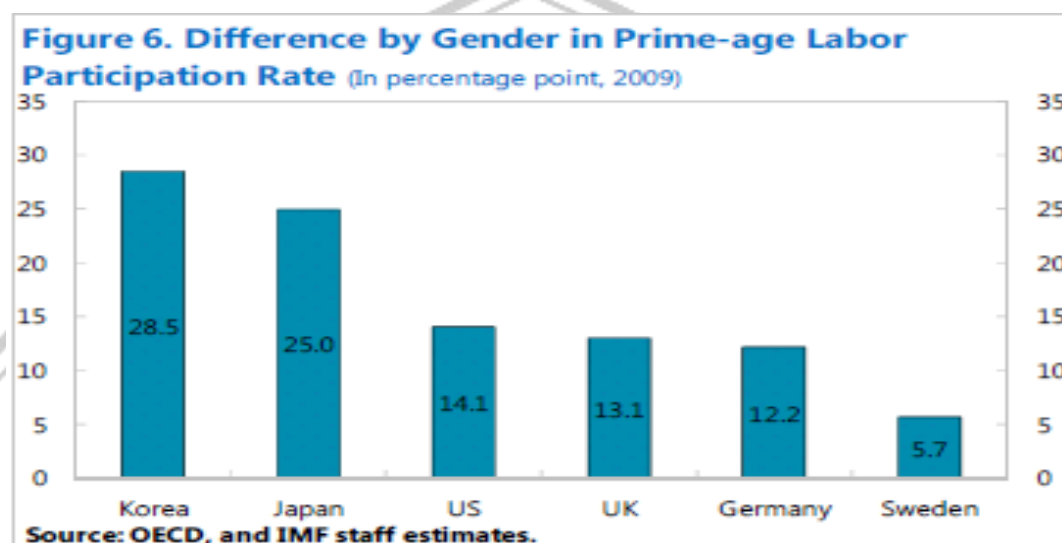
Source: OECD.

Grafik 2 Immigration and Female Labor Participation, from :
<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Can-Women-Save-Japan-40048>.

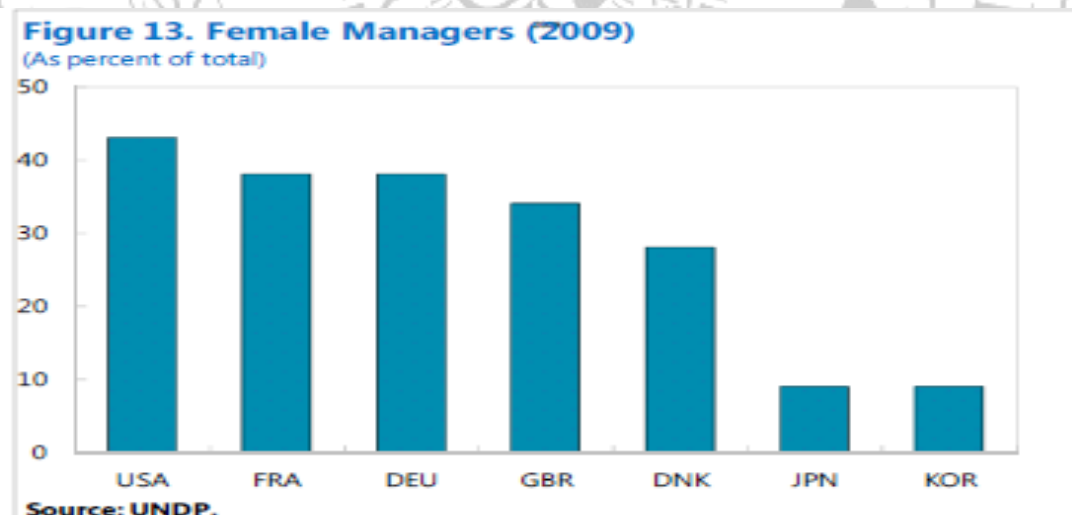
Berdasarkan faktanya, rendahnya partisipasi kaum perempuan dikarenakan keadaan paska kelahiran yang kemudian tidak melanjutkan pekerjaan, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya dukungan dan kebijakan ketenagakerjaan yang tidak fleksibel. Pada akhirnya banyak kaum perempuan yang kehilangan pekerjaannya, meskipun mungkin ada beberapa yang tetap melanjutkan pekerjaan setelah melahirkan, biasanya mereka hanya mengambil waktu yang singkat atau

²⁷ *International Monetary Fund, Op. Cit.*

biasa disebut *part-timer* sehingga mendapatkan penghasilan yang tergolong rendah.²⁸ Untuk itu pemerintah Jepang harus lebih berupaya menyediakan kebijakan-kebijakan sebagai terobosan efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.



Grafik 3. Difference by Gender in Prime-age Labor, From : <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Can-Women-Save-Japan-40048>.



Grafik 4 Female Managers, From : <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Can-Women-Save-Japan-40048>.

²⁸ Jeff Kingston, *Saving Japan : promoting women's role in the workforce would help*. TheJapanTimes. From: <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2013/04/21/commentary/saving-japan-promoting-womens-role-in-the-workforce-would-help/>. (23/7/2020. 21:12 WIB.)

Lebih lanjut, Grafik diatas menunjukkan bahwa diskriminasi perempuan pada lingkup pekerjaan sangat terlihat, yaitu menghasilkan perbandingan 25% partisipasi kaum perempuan dibawah kaum laki-laki. IMF juga menyebutkan bahwa pada tahun 2009 Jepang memiliki karakteristik gap pada lingkup tenaga kerja yaitu kurangnya manajer perempuan. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, Jepang tertinggal 34% tentang partisipasi kaum perempuan yang berposisi sebagai manajer. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat partisipasi kaum perempuan dan praktik perekrutan yang didasari oleh kebijakan promosi yang tidak efektif serta kurangnya kebijakan sektor publik.²⁹

3. Human Rights Committee (HRC)

Dewan Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa bagaimana Jepang dapat mencapai kesetaraan gender jika masih banyak terdapat kasus kasus pelanggaran HAM.³⁰ Jepang dinilai telah gagal dalam mengatasi beberapa masalah hak asasi yang telah berlangsung lama. Pada tanggal 30 Oktober 2008, Dewan HAM PBB melakukan pengamatan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan adanya tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan, perlakuan buruk terhadap tahanan, kurangnya penuntutan terhadap pelaku kejahatan yang terjebak pada kasus perdagangan manusia.³¹ Berdasarkan hal-hal tersebut, kondisi terkait tindakan-tindakan negatif yang dialami kaum perempuan Jepang tentunya selalu mendapatkan perhatian internasional. Isu-isu kaum perempuan Jepang seolah-olah

²⁹ *International Monetary Fund, Op. Cit.* hal. 18.

³⁰ Lawrence Repeta, *U.N. Committee Faults Japan Human Rights Performance, Demands Progress Report on Key Issues*. The Asia-Pacific Journal. Vol. 7. No. 5. Hal. 1. From : <https://apjif.org/-Lawrence-Repeta/3147/article.pdf>. Diakses pada (23/7/2020. 23:13 WIB)

³¹ *Ibid.* hal. 2.

terus menjadi hambatan dan sekaligus tantangan bagi Jepang dalam mencapai kesetaraan gender. Pemerintah Jepang harus memfokuskan diri pada ranah pendidikan kaum perempuan. Pendidikan selalu diyakini menjadi kunci dari penyelesaian masalah-masalah yang terjadi saat ini. Kaum perempuan dengan pendidikan yang tinggi akan dapat terlepas dari ketergantungan terhadap kaum laki-laki, dalam artian bahwa perempuan dengan pendidikan yang layak tentu dapat menjalani kehidupan yang lebih mandiri.

Lebih lanjut, HRC juga sangat memperhatikan berbagai kasus kekerasan pada kaum perempuan, salah satunya ialah kasus pemerkosaan. HRC sangat prihatin dengan definisi pemerkosaan dalam hukum domestik Jepang yang hanya mencakup secara umum hubungan antara kaum pria dan perempuan saja. HRC kemudian merekomendasikan bahwa Jepang harus lebih memperhatikan definisi pemerkosaan dengan cara memperluas definisi dan memastikan pelecehan seksual selain dari hubungan seksual yang sebenarnya, pemerkosaan oleh kaum laki-laki dan perkosaan dalam perkawinan dianggap tetap sebagai pelanggaran pidana yang serius.³² Mengingat bahwa Jepang juga memiliki tren yang sangat terkenal yaitu dunia pornografinya. Dampak negative dari pornografi selalu terarah pada kaum perempuan yang dapat berupa pemerkosaan dan pelecehan seksual bahkan hingga kekerasan seksual.

³² United nations. *General Assembly*. Human Rights Council. Fourteenth session. United Nations. Hal. 9. From: https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/HRBodies/UPR/Documents/Session14/JP/A_HRC_WG.6_14_JPN_2_Japan_E.doc&action=default&DefaultItemOpen=1 . (24/7/2020. 01:14 WIB)

2.3 NPO Fathering Japan

2.3.1 Gambaran Umum

Di Jepang pada dewasa ini, terdapat perubahan peran ayah,³³ dimana sebagian besar dari kaum pria, terutama yang lebih tua, merasa hanya memiliki tempat di kantor pekerjaan mereka, sehingga para ayah di Jepang seolah-olah seperti kehilangan peran mereka ketika berada di rumah bersama keluarga. Kurangnya peran ayah dalam keluarga dapat mengakibatkan dampak tersendiri bagi sang anak dan seorang istri. Salah satu hal yang menjadi pemicu didirikannya NPO *Fathering Japan* adalah insiden pada tahun 2006 di mana seorang siswa sekolah menengah membakar rumahnya, hingga menewaskan ibu tirinya, adik laki-laki dan perempuannya. Setelah melewati beberapa penelusuran, motif anak tersebut ialah karena dendam yang mendalam terhadap ayahnya yang berprofesi sebagai dokter, yang menginginkan anaknya untuk mengikuti jejaknya, namun di sisi lain sang ayah secara teratur menyiksa anaknya secara fisik dan psikologis.³⁴ Seorang ayah tidak berupaya untuk mencoba memetakan seluruh kehidupan seorang anak dan seharusnya Para ayah berada di sana untuk mendukung anak-anak dalam apa pun yang mereka pilih untuk dilakukan dengan kehidupan mereka. Berdirinya NPO Fathering Japan juga tidak dapat terlepas dari pengalaman-pengalaman sang pendiri, Tetsuya Ando, baik pengalaman ketika masa kecilnya ataupun ketika menjadi seorang ayah.

³³ Michael Hoffman, *The Changing Face of Fatherhood in Japan*. From : https://www.japantimes.co.jp/news/2012/11/11/national/media-national/the-changing-face-of-fatherhood-in-japan/#.XAnSB_nFLIU , (6/12/2018, 14:00 WIB)

³⁴ Mami Maruko, *Loc. Cit.*

Lebih lanjut, Ando menceritakan bahwa ia sendiri membenci ayahnya karena sebagai ayah yang hanya fokus terhadap pekerjaannya saja dan tidak pernah memperhatikan urusan keluarga sedikitpun. Kemudian juga ketika Ando menjadi seorang ayah yang bekerja sebagai manajer di Rakuten.inc, dia sempat mengalami ketegangan dengan istrinya, ketika sang istri pergi dari rumah, Ando baru menyadari semua kesalahannya dalam hal terlalu fokus pada pekerjaannya. Kepergian istrinya ditenggarai oleh sikap buruk dari Ando yang tidak pernah menghabiskan waktu bersama keluarga dirumah. Oleh karena itu, dengan mendirikan NPO *Fathering Japan*, secara umum Ando ingin merubah peran Ayah di Jepang, dengan merubah karakteristik seorang ayah yang mampu ikut andil dalam urusan domestik keluarga, terutama dalam hal mengasuh anak. Setelah insiden kepergian istrinya dari rumah, Ando mulai berlatih bagaimana cara mengurus seorang anak dan menulis kisahnya dalam sebuah buku.³⁵

2.3.2 Profil dan Tujuan

NPO (*Non-Profit Organization*) *Fathering Japan* adalah Organisasi yang didirikan oleh Tetsuya Ando. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 November 2006, kemudian bergabung dengan NPO korporasi di Tokyo pada 13 Desember 2006, dan sertifikasi untuk pertama kali di Tokyo pada 29 Maret 2007 dan sekaligus menandakan bahwa organisasi ini bermarkas di Tokyo.³⁶ Selain itu *Fathering Japan* memiliki beberapa cabang di beberapa daerah di Jepang diantaranya, FJ (*Fathering Japan*) Kyushu, FJ Kansai, FJ Tokai, FJ Chugoku, FJ Tohoku, FJ Hokkaido, FJ Chiba, FJ Shiga, FJ Niigata, FJ Bunkyo ku, FJ Oedo

³⁵ *ibid*

³⁶ NPO *Fathering Japan*, *Loc. Cit.*

serta FJ Pelajar.³⁷ Dibukanya beberapa cabang di berbagai kota wilayah Jepang bertujuan untuk menambah atau meningkatkan kapasitas organisasi tersebut dalam menyediakan program-program layanan sosial sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari Fathering Japan adalah untuk meningkatkan kesadaran seorang dalam urusan keluarga, terutama dalam hal pengasuhan anak. Kesadaran tersebut akan dapat membebaskan para ayah dari tekanan pekerjaan, sehingga dapat berkomitmen dalam urusan keluarga dan peran ayah sangat diharapkan dalam menghadapi berbagai permasalahan seperti, penurunan angka kelahiran, timbulnya keresahan sosial, dan berbagai kasus kejahatan di sekitar anak-anak dan perempuan.³⁸ Keterlibatan peran ayah pada urusan keluarga secara signifikan diyakini dapat membawa suasana kedamaian terhadap kelangsungan hidup anak-anak dan mengurangi stress yang di alami oleh para ibu.

2.3.3 Fathering Japan dalam menyediakan program-program untuk meningkatkan kesadaran kesetaraan gender.

2.3.3.1 Program “Mothering” sebagai instrument pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan nilai-nilai yang ada pada budaya patriarki, bahwa kedudukan perempuan yang berada pada posisi yang dianggap sebagai suatu penindasan terhadap kaum mereka menghasilkan semakin meluasnya kesenjangan sosial, yakni terutama antara kaum laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki juga menghasilkan suatu bentuk diskriminasi antar kaum laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkup keluarga yang mana perempuan tidak begitu memiliki hak waris

³⁷ Cabang NPO Fathering Japan, <http://fathering.jp/branch> (16/11/2018, 19:57 WIB)

³⁸ Tujuan NPO Fathering Japan, <http://fathering.jp/about> (16/11/2018, 21:20 WIB)

dan dalam lingkup pekerjaan dimana upah atau gaji perempuan jauh berada dibawah kaum laki-laki meskipun di ranah pekerjaan yang sama.



Gambar 1. Mothering Project, (Sarezare no jikan ni iru mamatachiga, egao ni, genki nareru youni. Mazaringu Purojekuto) From : <https://www.fathering-japan-mothering.com/>.

Selain itu, posisi kaum perempuan memiliki dominasi yang sangat signifikan dalam hal pengasuhan anak, sosok seorang ibu seolah-olah yang menjadi kunci utama dalam mengurus seluruh pekerjaan rumah dikarenakan tidak adanya peran dari seorang ayah yang hanya fokus terhadap pekerjaannya saja. Hal-hal semacam ini membuat para ibu sering mengalami stress karena tekanan pekerjaan rumah dan mengurus anak dilakukan olehnya sendiri, contohnya seperti yang diceritakan oleh Tetsuya Ando, bahwa istrinya pernah pergi dari rumah selama satu hari lantaran stress dan marah terhadapnya karena kesibukan kerja yang membuatnya tidak pernah ikut andil dalam urusan rumah. Insiden ini juga mengawali kesadaran bagi Tetsuya Ando bahwa peran dari kaum pria atau para ayah sangat diperlukan untuk terjun membantu kaum perempuan atau para ibu dalam urusan pekerjaan rumah dan pengasuhan anak. Oleh karena itu, adanya program “Mothering” bertujuan untuk lebih meningkatkan kedekatan terhadap

kaum perempuan, mengurangi beban, dan pemberdayaan, khususnya bagi para ibu. Program ini dilaksanakan oleh anggota-anggota perempuan yang ada pada organisasi *Fathering Japan* dengan cara menyelenggarakan sosialisasi, seminar dan pembinaan terhadap para ibu. Cara-cara tersebut mengarah pada suatu harapan dimana program ini dapat meningkatkan upaya-upaya dalam pengasuhan anak yang efektif dan kesadaran kerja (karir) serta lingkungan bagi perempuan dengan anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial.³⁹



Gambar 2, from: <https://www.fathering-japan-mothering.com/>

³⁹ Project Mothering, <http://fathering.jp/project/mothering> , (18/11/2018, 09:20 WIB)



Gambar 3, from : <https://www.fathering-japan-mothering.com/>

Gambar 2 diatas merupakan tempat atau forum yang disediakan oleh *Fathering Japan* untuk bagi para ibu yang bekerja. Dalam forum tersebut, para ibu dapat berdiskusi untuk menyuarakan pendapat mereka terkait dunia pekerjaan dan bagaimana mendapatkan dukungan dalam memilih waktu cuti pengasuhan anak yang mana waktu cuti tersebut akan disesuaikan dengan waktu cuti pengasuhan anak oleh seorang ayah.⁴⁰ Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga harmonisasi keluarga dan menghindari kesenjangan-kesenjangan yang pada rumah tangga. Sedangkan Gambar 3 menunjukkan upaya *Fathering Japan* dalam mendukung program perempuan karir, dengan cara menghimpun kaum-kaum perempuan teladan yang sudah mencapai taraf kehidupan sukses dan mandiri yang kemudian akan dilibatkan dalam forum sosialisasi. Forum sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para ibu yang belum memahami potensi diri mereka masing-masing dengan baik setelah beberapa tahun karena

⁴⁰ *Fathering Japan, Mothering Project*, from : <https://www.fathering-japan-mothering.com/>.

pengasuhan anak. Dengan demikian melalui forum diskusi yang intens akan dapat memberikan petunjuk tentang cara hidup di masa depan.⁴¹

2.3.3.2 Progam Proyek Reproduksi



Gambar 4, Progam Reproduksi, from : https://www.fathering-japan.com/Kazoku_no_sei_to_nama_o_kangaeru_purojekuto.

Isu *shoushika* telah menjadi topik hangat di Jepang saat ini. Penuaan populasi yang jumlahnya kian meningkat disetiap tahunnya terjadi seiring menurunnya angka kelahiran atau pertumbuhan di negara tersebut. Pemerintah Jepang telah diujani banyak kritik oleh para kaum perempuan yang menilai bahwa pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan bagi para keluarga dan anak-anak dalam hal reproduksi. Selain itu, pemerintah juga dinilai kurang memperhatikan angka, jumlah, waktu dan jarak kelahiran, yang mana seharusnya setiap pasangan memiliki hak untuk memperoleh informasi dan sarana dalam

⁴¹ Ibid.

konteks *Sexual and Reproductive Health and Rights* (SRHR). Hak-hak reproduksi telah lama dianggap sebagai "hak penentuan nasib sendiri kaum perempuan" sebagai hak asasi manusia yang fundamental dalam hal seksual dan sejarah reproduksi. Kesehatan reproduksi, dalam semua aspek sistem reproduksi manusia dan fungsi dan proses aktivitasnya, tidak hanya berupa penyakit dan gangguan, tetapi juga dalam keadaan yang sangat baik secara fisik, mental dan sosial.⁴² Oleh karena itu, keberadaan *Fathering Japan* ialah untuk mengarahkan semua tentang hal tersebut. Kegiatan dalam program tersebut diantaranya, menyediakan kegiatan diskusi public atau seminar dalam rangka memberikan pengetahuan tentang *sex education* yang didalamnya juga terdapat pembahasan tentang bagaimana menjadi ayah yang baik serta menyediakan program yang mengupayakan pengobatan kemandulan. Program ini sangat didukung oleh semua kalangan, khususnya kaum laki-laki, mereka memiliki intensitas tinggi dan aktif dalam berkomitmen menjadikan SRHR sebagai instrument langkah konkrit dalam menyelesaikan permasalahan gender. Selain itu, sosialisasi kehidupan keluarga berencana, hubungan perkawinan, serta pendidikan seks untuk generasi penerus terus dilakukan.

⁴² Tentang Proyek Reproduksi, http://www.fathering.jp/repro/about_repro.html , (23/11/2018, 20:30 WIB).



Gambar 5. *Kazoku no sei to nama o kangaeru purojekuto* from: <http://www.fathering.jp/repro/>.

Berdasarkan pada penjelasan yang terletak di bab sebelumnya bahwa Jepang juga dikenal dengan industri pornografi yang tentunya menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, khususnya anak-anak. Dalam hal ini peran orang tua menjadi kunci utama untuk memberikan pemahaman bagi anak-anak mereka tentang bagaimana memperlakukan lawan jenis dan memberikan pendidikan seks yang baik dan benar sehingga anak-anak akan menjadikan orangtua sebagai cermin untuk memahami hubungan antara pria dan perempuan sekaligus mencegah dampak-dampak negative dunia pornografi seperti kekerasan seksual, pelecehan seksual dan pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.⁴³ Mengenai hal-hal tersebut, peran ayah sangat diperlukan dalam konteks kehidupan keluarga dan seksualitas. Melalui program ini *Fathering Japan* menunjukan bahwa sosok ayah sebagai kepala keluarga tidak dinilai hanya dari persoalan ekonomi saja, namun juga sosok yang dapat menjadi pilar mental bagi keluarganya dan menjaga sekaligus menjadi pelindung posisi perempuan dan anak-anak di dalam keluarganya masing-masing.

⁴³ *Ibid.*

2.3.3.3 Progam/Proyek *Sankyu Papa* sebagai Reformasi Gaya Kerja Kaum Pria dan Mempromosikan Cuti Pengasuhan Anak.

Jepang merupakan salah satu ikon negara dengan ekonomi terkuat di benua asia, hal tersebut tak lepas dari karakteristik masyarakatnya dalam dunia pekerjaan yang notabene ber-prinsip totalitas kerja dan memiliki jam kerja yang panjang disetiap harinya. Aktivitas kerja dan kebiasaan kaum pria di Jepang mengalami perubahan setelah perang dunia 2, yang mana sebelumnya pada zaman Edo seorang ayah/suami berperan penuh dalam domestik rumah tangga termasuk juga dalam hal pengasuhan anak, namun waktu perkembangan yang pesat pada sektor indutrialisasi setelah perang dunia 2 membuat kaum pria difokuskan dalam sektor pekerjaan untuk peningkatan ekonomi nasional. Hal tersebut mengakibatkan keterlibatan suami/ayah mengalami penurunan drastis, kemudian pada saat itu disertai munculnya konsep *katei* yang merupakan promosi pemerintah untuk para kaum pria dapat berperan aktif di ruang publik untuk meningkatkan ekonomi nasional dan pembentukan bangsa yang modern.⁴⁴ Oleh sebab itu, Jepang mengalami kesenjangan sosial antara kaum pria dan perempuan, yang mana kaum pria mendapatkan kebebasan di ruang publik sedangkan kaum perempuan mendapati ruang kebebasan yang semakin sempit akibat tindakan diskrimantif tersebut.

Lebih lanjut, meninjau karakteristik dari kaum pria di Jepang yang fokus dalam pekerjaan dan hampir menghabiskan waktu di ruang publik menjadikan peran kaum perempuan dalam kehidupan rumah tangga cenderung lebih dominan

⁴⁴ Iis Muhayaroh, *Op. Cit.*

dari pada kaum pria. Itu berarti bahwa seorang ibu memiliki peran yang lebih besar dalam urusan domestik rumah tangga, khususnya dalam pengasuhan anak. Mengingat bahwa masyarakat Jepang tidak memiliki kebiasaan menggunakan jasa pramusiwi (*baby sitter*) dan pembantu rumah tangga. Oleh sebab itu ruang kebebasan bagi kaum perempuan hanya terbatas dari dalam rumah sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap ibu mengalami hambatan karena urusan rumah tangga.⁴⁵ Pada faktanya, kepadatan pada jam kerja mengakibatkan hilangnya peran ayah dalam lingkup rumah tangga dan keluarga. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan dampak negatif tersendiri bagi para ibu dan anak-anak mereka. Kesenjangan, konflik dan masalah-masalah keluarga merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh kaum pria sebagai kepala keluarga ketika mereka kehilangan peran dalam urusan rumah tangga.⁴⁶ Mengingat bahwa berdirinya *Fathering Japan* berawal dari peristiwa yang terjadi pada tahun 2006 dimana seorang siswa pelajar sekolah menengah membakar rumahnya sendiri. Peristiwa tersebut mengakibatkan tewasnya anggota keluarga termasuk ibu tirinya, adik laki-laki dan perempuannya. Diketahui bahwa anak tersebut melakukan perbuatannya atas dasar kebencian kepada ayahnya yang berprofesi sebagai dokter jarang memiliki waktu bersama, dan terlalu menuntutnya serta sering menyiksa secara fisik ketika sang ayah berada di rumah sehingga sang anak mengalami tekanan psikologis yang signifikan.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 101.

⁴⁶ Mami Maruko, *Loc. Cit.*

⁴⁷ *Ibid.*



Gambar 6. Papa Komi, From: <https://fathering.jp/index.html>.

Program *Sankyu Papa* adalah suatu program yang mendorong kaum laki-laki khususnya para ayah untuk dapat melaksanakan program pengasuhan anak dan dilakukan dalam waktu ketika mengambil cuti pekerjaan. Tujuan dari program tersebut ialah untuk meningkatkan kesadaran para kaum ayah tentang pentingnya mengasuh anak serta untuk mencapai gaya baru dalam kehidupan pekerjaan guna keseimbangan antara waktu kerja dan pengasuhan anak agar kedepannya generasi penerus dapat memahami pentingnya peran ayah dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga termasuk hal pengasuhan anak oleh ayah.⁴⁸ Program yang diluncurkan pada tahun 2010 ini juga merupakan tujuan utama dari terbentuknya *Fathering Japan* yang ingin meningkatkan kesadaran kaum pria dalam urusan keluarga sehingga dapat membebaskan tekanan kaum perempuan sebagai ibu dari beratnya beban mengurus rumah tangga seorang diri. Terdapat 3 misi dalam program ini, diantaranya:

⁴⁸ *Fathering Japan, Sankyu Papa*, From : <https://www.fathering-japan-thankyoupapa.com/>.

1. Meningkatkan jumlah kaum pria yang mengambil cuti pengasuhan anak dalam waktu 8 minggu setelah ibu melahirkan.
2. Membangun konektivitas antar kaum pria selama masa pengambilan cuti.
3. Mempromosikan cuti pengasuhan anak kepada masyarakat, lembaga pekerjaan dan melakukan pendampingan untuk reformasi struktur sosial.

Pengambilan cuti selama 8 minggu setelah ibu melahirkan merupakan langkah positif untuk membebaskan kaum perempuan sebagai ibu dari tekanan stress akibat mengurus seluruh urusan rumah tangga. Durasi cuti 8 minggu juga berasal dari ketentuan Undang-Undang standar ketenagakerjaan tentang perlindungan kehamilan yang mana kaum perempuan yang berkerja wajib untuk cuti selama 8 minggu setelah kehamilan. Hal ini juga bertujuan untuk perubahan dan pergeseran diskriminasi akibat nilai-nilai tradisional yang mana sangat merendahkan posisi kaum perempuan.⁴⁹

Kegiatan-kegiatan pada program ini dilakukan dengan melibatkan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan sanksi bagi lembaga-lembaga perusahaan yang melanggar. Hal tersebut untuk mencegah hambatan-hambatan yang dialami kaum pria untuk mendapatkan cuti dari tempat mereka bekerja, pasalnya pengambilan cuti juga akan berdampak negatif berupa kerugian finansial dan resiko kehilangan pekerjaan. Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut, *Fathering Japan* memiliki 5 kegiatan utama, diantaranya:

⁴⁹ *Ibid.*

1. Menghimpun dana sumbangan dan sponsor yang dikumpulkan dari individu, perusahaan dan organisasi yang lalu kemudian disalurkan kepada para ayah yang membutuhkan bantuan ketika menjalani cuti pengasuhan anak.
2. Menyediakan ruang diskusi untuk menyuarakan pendapat.
3. Dalam rangka mempromosikan cuti pengasuhan anak bagi para ayah, *Fathering Japan* akan melakukan kegiatan edukasi kepada keluarga yang bersangkutan.
4. Meningkatkan pemahaman perusahaan terkait undang-undang pengasuhan anak yang telah direvisi oleh pemerintah dan meminta untuk membangun lingkungan ramah anak di tempat kerja.

Menindak-lanjuti suara-suara masyarakat yang menginginkan dan yang sedang menjalani cuti pengasuhan anak, serta ber-inisiatif lanjutan untuk mempengaruhi perusahaan-perusahaan agar menerima cuti pengasuhan anak dalam jumlah besar.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*